



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HANTRIONO JOKO SUSILO
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 118248

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **6.380.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 152 m2/120 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 68 m2/44 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 630.000.000
3. Tanah Seluas 309 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 101 m2/36 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 68 m2/44 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
6. Tanah Seluas 561 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 50 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000.000
8. Tanah Seluas 596 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, WARISAN Rp. 110.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/156 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **172.000.000**



1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ MATIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 153.823.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 3.801.633.280

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.887.632.694

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 13.395.088.974

III. HUTANG Rp. 656.664.475

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 12.738.424.499

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.